

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hubungan internasional merupakan sebuah interaksi sosial antar aktor yang interaksinya melintasi batas aktor negara dan non-negara (Spindler, 2013). Interaksi dalam hubungan internasional mencakup kerja sama pada berbagai aspek, seperti aspek politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta keamanan. Kerja sama yang dilakukan oleh aktor negara maupun non-negara dilandasi oleh kepentingan masing-masing pihak demi mencapai dan memenuhi kepentingan nasional negaranya. Adanya kerja sama yang terjadi di dalam hubungan internasional ini bisa dilakukan atas dasar persamaan kepentingan hingga perbedaan yang turut ada didalamnya. Melihat fakta bahwa dunia sudah berkembang pesat seperti saat ini menjadikan adanya kerja sama yang tidak lagi terpaku pada tingkat negara saja namun juga dapat mengikutsertakan berbagai macam aktor non-negara. Bentuk kerja sama yang dilakukan antarnegara terbagi menjadi dua yaitu kerja sama bilateral dan kerja sama multilateral. Dalam kerja sama bilateral hanya melibatkan dua aktor saja, adapun salah satu bentuk kerja sama yang berpotensi meningkatkan perekonomian nasional adalah investasi asing. Investasi asing ini penting dan mampu untuk memenuhi penyediaan dana kebutuhan suatu negara. Dengan investasi asing, pengoperasian proyek-proyek yang dirancang pemerintah dapat berjalan lebih efisien, memberikan jangkauan layanan yang lebih luas, dan mengurangi beban keuangan pemerintah (World Bank, 1995).

Hubungan kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok bukanlah sesuatu yang baru bagi kedua belah pihak, sehingga membuat hubungan antar kedua negara terjalin erat dalam berbagai sektor. Hingga saat ini hubungan antar keduanya telah berada dalam titik *comprehensive partnership* dimana hal ini membuktikan bahwa kedua negara telah banyak mencapai kesepakatan kerja sama. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok telah terjalin sejak tahun 1950-an. Kedua negara tersebut juga berjalan lebih lanjut untuk menyesuaikan strategi pembangunan masing-masing negara, dengan tujuan yang sama diharapkan dapat berkontribusi

Rania Viccie Adnyahayu, 2022

IMPLEMENTASI KERJA SAMA INDONESIA – TIONGGOK DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI LAUT DI PELABUHAN KUALA TANJUNG

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

pada pemulihan ekonomi regional dengan mempromosikan kerja sama pembangunannya. Tiongkok sebagai salah satu negara yang menjalin kerja sama dengan Indonesia secara intensif juga ikut serta dalam salah satu pembangunan infrastruktur. Kepentingan serta tujuan masing-masing kedua belah pihaklah yang menjadi salah satu dasar terjadinya kerja sama ini.

Dalam periode pertama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo telah dibentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 yang merupakan tahapan ketiga yang berasal dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, dalam rangka perwujudannya maka akan dilakukan melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan (Bagian Fasilitas Penguatan Kinerja. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, n.d.)

Lalu dalam periode kedua masa pemerintahan Presiden Joko Widodo beserta Wakilnya Ma'ruf Amin juga ikut mencetuskan beberapa visi pembangunan untuk periode selanjutnya selama 5 tahun kedepan demi membentuk Indonesia yang lebih baik, produktif, memiliki daya saing, hingga kemampuan untuk menghadapi perubahan global. Adapun 5 visi nya antara lain adalah, pembangunan

Rania Viccie Adnyahayu, 2022

IMPLEMENTASI KERJA SAMA INDONESIA – TIONGGOK DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI LAUT DI PELABUHAN KUALA TANJUNG

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, mengundang investasi secara luas, reformasi birokrasi, serta penggunaan APBN. Hal tersebut menunjukkan kepentingan Indonesia yang harus dicapai dalam masa jabatan Presiden Joko Widodo. Ia juga telah menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur harus dilanjutkan dalam periode pemerintahannya, dimana fokus nya akan ditujukan dalam menyambungkan infrastruktur yang telah ada dengan kawasan industri, kawasan ekonomi khusus, tambak, perkebunan, persawahan, hingga pariwisata. Selain itu, visi selanjutnya dimana pemerintahannya harus memprioritaskan untuk mendatangkan investasi di tanah air karena hal tersebut sangat diperlukan untuk membuka peluang dan potensi lapangan kerja yang luas (Nurhanisah, 2020). Presiden Joko Widodo juga sempat mengungkapkan data Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, bahwa pembangunan infrastruktur selama lima tahun kedepan perlu terus dilakukan demi daya saing Indonesia yang lebih ekstra dibandingkan negara lain (Fauzia, 2019).

Dilihat dari Visi Misi Presiden maka pengembangan serta pembangunan di dalam sektor transportasi menjadi fokus penting. Hal tersebut dilakukan juga untuk meningkatkan produktifitas pada sektor lain. Adanya mobilitas dari seluruh aspek industri dan berbagai kebutuhan setiap individu juga tergantung dalam kualitas dan kemampuan sektor transportasinya. Hal tersebut menjadikan Indonesia yang dikenal sebagai salah satu negara berkembang mengalami beberapa tantangan dan masalah sama dengan negara lainnya dalam pembangunan infrastruktur. Dibutuhkan banyak biaya yang tergolong besar untuk mendanai pelaksanaan pembangunan ini dengan tujuan menyeimbangkan ketertinggalan sektor infrastruktur yang sudah dikembangkan oleh negara-negara yang telah maju. Indonesia membutuhkan biaya lebih selain dari anggaran nasional untuk memenuhi kebutuhan dan mengejar ketertinggalannya. Kegiatan kerja sama ini dapat dijadikan sebagai ladang investasi untuk Indonesia yang sangat berguna sebagai salah satu sumber lain pendanaan demi memenuhi pembiayaan pembangunan (Antara News, 2020). Tersedianya layanan infrastruktur yang memadai juga dapat menjadi faktor penting terhadap perkembangan pasar, bertambahnya keuntungan, serta

Rania Viccie Adnyahayu, 2022

IMPLEMENTASI KERJA SAMA INDONESIA – TIONGKOK DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI LAUT DI PELABUHAN KUALA TANJUNG

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

terjangkaunya kemudahan akses untuk layanan infrastruktur untuk keperluan masyarakat demi menaikan kesejahteraan rakyat, terutama untuk rakyat miskin. Namun, hingga saat ini kontribusi sektor infrastruktur terhadap pemberantasan kemiskinan dan pengembangan ekonomi masih belum sepenuhnya terealisasi dengan baik, tak hanya itu beberapa layanan infrastruktur juga masih tergolong jauh dari pernyataan layak.

Pelabuhan Kuala Tanjung, merupakan salah satu pelabuhan yang berada di Indonesia tepatnya di Sumatera Utara. Secara resmi, kerja sama pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung telah tercantum dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) antara PT. Pelabuhan Indonesia I Persero sebagai BUMN yang seluruh sahamnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia dengan salah satu badan usaha milik Tiongkok yang bergerak dalam sektor laut yaitu *Zhejiang Provincial Seaport Investment & Operation Group Co. Ltd.* yang sudah dimulai dari tahun 2019 dan disahkan pada tanggal 7 Mei 2021 yang lalu. Direktur Utama Pelindo I Prasetyo menyatakan bahwa penandatanganan nota kerja sama dan daftar persyaratan akan mempercepat pengembangan Kuala Tanjung *Port Industrial Estate* yang nantinya akan menjadikan Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai hub logistik dan rantai pasokan di Indonesia (Liputan 6, 2021). Pengelolaan dan pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung ini dijalankan dengan menggunakan salah satu skema pembangunan di Indonesia yaitu Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang menarik PT Pelindo I untuk melakukan kerja sama dengan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) milik China yaitu *Zhejiang Provincial Seaport Investment & Operation Group Co. Ltd.*

Zhejiang Provincial Seaport Investment & Operation Group Co. Ltd. merupakan salah satu badan usaha milik pemerintah Tiongkok yang menjadi rekan kerja sama dalam pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung. Adapun harapan kerja sama antara kedua belah pihak antara lain, dapat membentuk pelabuhan dengan seluruh fasilitas yang memiliki standar internasional serta dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Kerja sama Indonesia – Tiongkok melalui proyek pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung dapat dinilai sebagai bukti konkret dari kerja sama bilateral antar keduanya. Pembangunan ini juga

Rania Viccie Adnyahayu, 2022

IMPLEMENTASI KERJA SAMA INDONESIA – TIONGKOK DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI LAUT DI PELABUHAN KUALA TANJUNG

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) RI No.26/2012 Tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional, Pelabuhan Kuala Tanjung ditetapkan sebagai Hub Internasional wilayah Barat Indonesia, lalu Perpres RI No. 81/2018 Tentang Percepatan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan dan Kawasan Industri Kuala Tanjung, Sumatera Utara, pihak pemerintah telah menugaskan PT Pelindo I untuk membangun dan mengoperasikan pelabuhan tersebut (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2020). Meski kerja sama antara Indonesia dengan Tiongkok telah disiapkan dalam rancangan *Head of Agreement* sebagai proyek tahap pertama di tahun 2019, namun proses pelaksanaan kerja sama antar kedua belah pihak tidak berjalan selaras dengan semestinya. Kedua negara ini banyak menghadapi berbagai konflik dan kendala didalam pelaksanaan pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pelabuhan ini antara lain seperti, ketersediaan energi listrik dan gas di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei dan Kawasan Industri (KI) Kuala Tanjung, isu konektivitas, wacana reklamasi, lambatnya proses yang ditempuh dalam pelaksanaan pembangunan sehingga tidak sesuai dengan rencana awal (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2020). Dapat dilihat dari berbagai kendala yang nyata, proyek yang berjalan ini belum dapat diselesaikan dengan tuntas. Dari pihak Indonesia dan Tiongkok sama-sama masih belum bertindak tegas untuk menyelesaikan konflik-konflik yang timbul sehingga proyek kerjasama ini belum terealisasi sesuai dengan rencana awal.

Dilihat dari fakta yang ada, bahwasannya Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan, maka Indonesia sangat bergantung pada sektor lautnya yang membuat transportasi laut hingga pengelolaan pelabuhan menjadi sebuah prioritas. Terciptanya pengelolaan pelabuhan kelas internasional juga menjadi salah satu acuan agar mendukung fasilitas kegiatan industri ekonomi. Pengelolaan pelabuhan juga patut dilaksanakan secara totalitas dan efektif demi menunjang pembangunan ekonomi wilayah sekitar, seluruh masyarakat, dan pemerintah. Pembangunan dan pengelolaan Pelabuhan Kuala Tanjung sebagai Pelabuhan Hubungan Internasional dicetuskan oleh pemerintah ke dalam Cetak Biru Sistem Logistik Nasional

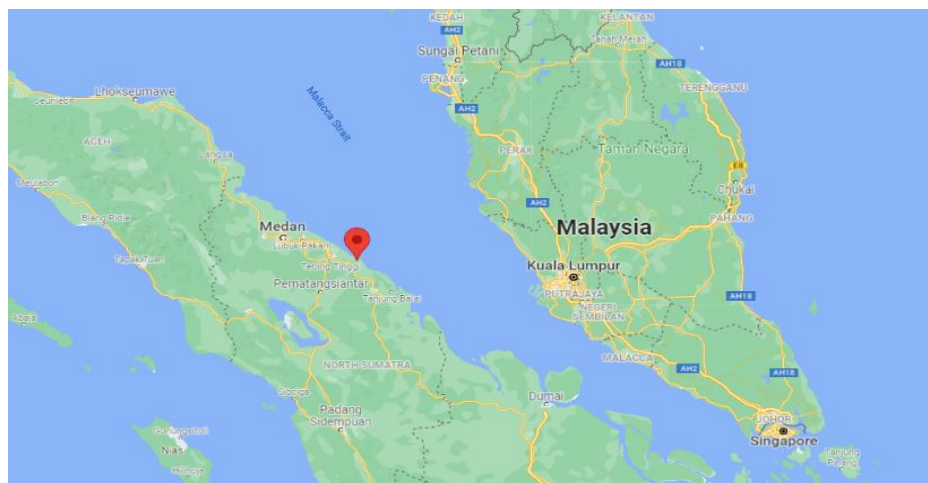
Rania Viccie Adnyahayu, 2022

IMPLEMENTASI KERJA SAMA INDONESIA – TIONGKOK DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI LAUT DI PELABUHAN KUALA TANJUNG

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

(Silognas) yang merupakan bagian dari *Masterplan* Percepatan Pembangunan dan Perluasan ekonomi Indonesia (MP3EI) dan konsep laut (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2009). Kurang memadainya fasilitas pelabuhan saat ini masih menimbulkan adanya hambatan bagi kegiatan yang ada di dalamnya, adapun hambatannya dapat berupa kemacetan dan *overload* di dalam kegiatan logistiknya. Peralunya kelancaran *inventory* dan transportasi sangat vital karena dapat memengaruhi rantai logistiknya, jika arus aktivitas di dalam pelabuhan terganggu maka hal tersebut akan langsung berdampak pada sektor lainnya (CNN Indonesia, 2021).

Gambar 1.1 Peta Lokasi Pelabuhan Kuala Tanjung dan Selat Malaka



Sumber: Google Maps

Posisi pelabuhan Kuala Tanjung sendiri tepat berhadapan dengan Selat Malaka yang dikenal sebagai Jalur Sutra Maritim, jalurnya pun diketahui sebagai salah satu jalur perdagangan tersibuk yang pernah ada. Jalur Selat Malaka merupakan jalur paling strategis untuk melakukan berbagai kegiatan perekonomian laut. Dilihat dari letak kawasannya maka diharapkan dapat memberikan pengaruh besar yang signifikan bagi pengembangan dan peningkatan perekonomian bagi Pelabuhan Kuala Tanjung tersebut. Banyaknya *demand* dan peluang yang dimiliki oleh jalur pelayaran ini menjadikan pelabuhan Kuala Tanjung sebagai tumpuan untuk menarik peminat dari lintasan strategis yang dilewati oleh jalur pelayaran utama. Adanya proyek pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung yang bertujuan untuk dijadikan sebagai Pelabuhan hub internasional maka dapat berpotensi

Rania Viccie Adnyahayu, 2022

IMPLEMENTASI KERJA SAMA INDONESIA – TIONGKOK DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI LAUT DI PELABUHAN KUALA TANJUNG

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

terjadinya kompetisi dengan pelabuhan-pelabuhan disekitarnya. Hal tersebut juga didorong karena adanya kemungkinan berpindahnya muatan dan arus logistik di Selat Malaka yang akan beralih ke Pelabuhan Kuala Tanjung. Untuk mencapai hasil dari potensi tersebut, pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin untuk membangun serta mengembangkan Pelabuhan Kuala Tanjung. Namun, agar tercapai dan terwujudnya tujuan tersebut juga diperlukan pembiayaan yang tidak sedikit, dimana biayanya melampaui kapasitas nasional Indonesia bila tidak ada bantuan asing. Seperti halnya, Indonesia sudah sering menerima bantuan asing dalam berbagai bentuk seperti hibah, pinjaman, hingga investasi.

Terkait dengan pemaparan di atas, muncul pertanyaan penulis mengenai bagaimana proses pelaksanaan kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan dan pembangunan infrastruktur transportasi laut pelabuhan. Penulis menilai topik ini relevan dengan kondisi Indonesia saat ini yang memiliki berbagai kebutuhan seperti memenuhi pembangunan infrastruktur laut yang memadai khususnya pelabuhan, pengembangan hingga pengelolaan guna menunjang peningkatan ekonomi nasional, serta mewujudkan impian sebagai “Poros Maritim Dunia”. Namun, dalam proses menempuh kebutuhan tersebut sangat diperlukan partisipasi oleh pihak lain, yang dalam hal ini dapat berpotensi untuk mewujudkan terealisasinya pembangunan infrastruktur berstandar internasional. Walaupun kerjasama yang dijalin dengan Tiongkok tidak lepas dari berbagai konflik dan tantangan di dalamnya, namun kedua belah pihak berupaya agar tetap memaksimalkan proses kerjasamanya.

Dalam hal mendukung proses penulisan penelitian ini, penulis menggunakan acuan dari berbagai sumber penelitian terdahulu yang memiliki relevansi untuk landasan teori sebagai sumber hipotesis melalui penelitian yang sudah diteliti sebelumnya oleh peneliti lain dengan pokok pembahasan yang sama namun studi kasus berbeda. Adapun beberapa tema yang telah ditemukan adalah mengenai kerjasama bilateral antara Tiongkok dan Indonesia dalam hal pembangunan infrastruktur serta kerjasama antara Tiongkok dengan beberapa negara lainnya terkait dengan pembangunan infrastruktur transportasi. Tinjauan pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah kerjasama yang dilakukan Indonesia

Rania Viccie Adnyahayu, 2022

IMPLEMENTASI KERJA SAMA INDONESIA – TIONGKOK DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI LAUT DI PELABUHAN KUALA TANJUNG

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

dan Tiongkok dalam *Belt and Road Initiative* analisa peluang dan ancaman untuk Indonesia. Peluang kerjasama dalam *Belt and Road Initiative* ini dinilai dapat memberikan peluang yang sangat baik bagi ekonomi politik Indonesia yang dapat dilihat bahwa kerjasama ini sejalan dengan adanya *Global Maritime Fulcrum* yang telah dirumuskan oleh pemerintah Indonesia ditahun 2014 lalu serta adanya wacana pembangunan jalur sutra yang dilanjutkan menjadi *Belt and Road Initiative* oleh pemerintah Tiongkok, dimana menjadikan kedua negara ini saling berketergantungan antara satu sama lain. Dapat juga dilihat bahwa dalam hal ini Tiongkok memerlukan Indonesia untuk memperkuat jalur sutra maritim dalam kawasan Asia Tenggara, serta Indonesia yang membutuhkan Tiongkok untuk pendanaan infrastruktur Poros Maritim Global (Yudilla, 2019). Pada dasarnya kerja sama Indonesia dan Tiongkok ini diperkuat juga oleh adanya potensi kedua negara dalam pengembangan sektor maritim. Kepentingan antara kedua negara juga tidak bisa dipisahkan karena keduanya saling melengkapi satu sama lain seperti Tiongkok yang menguasai jalur perdagangan vital maupun Indonesia yang membutuhkan Tiongkok sebagai investor dalam pengembangan dan pembangunan infrastruktur (Amalia, 2018). Lalu, kerjasama yang telah dilakukan oleh PT. Pelindo I Indonesia dengan *Port Of Rotterdam* Belanda juga dapat menjadi acuan karena telah dilakukan dengan didasari oleh beberapa kepentingan masing-masing pihak, yaitu visi Indonesia sebagai poros maritim, infrastruktur Pelabuhan Indonesia yang kondisinya belum memadai, serta adanya potensi dari pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung yang dapat menjadi Pelabuhan hubungan internasional dengan berbagai transfer informasi dan teknologi, investasi dan *strategic partnership*. Kerja sama yang terbentuk ini merupakan salah satu prioritas PT. Pelindo I dalam mewujudkan Pelabuhan Kuala Tanjung menjadi Pelabuhan hubungan internasional sebagai bentuk dukungan dalam program pemerintah yang berfokus pada sektor maritim dengan meningkatkannya fasilitas infrastruktur pelabuhan (Kinanti, 2018).

Selain itu, kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Tiongkok dalam Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung, yang juga menunjukkan hubungan yang erat antara kedua negara. Dilakukannya kerjasama ini oleh Presiden Joko

Rania Viccie Adnyahayu, 2022

IMPLEMENTASI KERJA SAMA INDONESIA – TIONGKOK DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI LAUT DI PELABUHAN KUALA TANJUNG

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Widodo semata-mata menjadi terobosan di bidang investasi yang dilakukan oleh Indonesia terkait dengan pembangunan infrastruktur dalam negeri. Tak hanya itu Indonesia melakukan pendekatan yang intens dengan terpilihnya Tiongkok sebagai operator dalam pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung agar Tiongkok juga memperbanyak investasinya di Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah Tiongkok juga menaruh kepercayaan lebih dengan adanya kemudahan berinvestasi di Indonesia. Hal tersebut dapat menjadi testimoni bagi negara lain yang ingin berinvestasi di Indonesia (Muhammad Yamin, 2017). Terbentuknya pembangunan infrastruktur yang baik di suatu negara menunjukkan bahwa adanya kemajuan dan menjadikan negara tersebut makmur. Dalam setiap pembangunan pada dasarnya terdapat berbagai bantuan dari negara lain yang dinilai nyata dan mampu untuk memberikan bantuan secara investasi keuangan (*Financial Investment*) maupun pinjaman (*Loan*). Belanja konstruksi ini diharapkan menjadi upaya pertumbuhan ekonomi di Indonesia sejak 2016 lalu, proyek kereta cepat ini merupakan contoh pembangunan infrastruktur tanpa menggunakan dana APBN, dimana skema *business to business* digunakan oleh konsorsium BUMN Indonesia dan konsorsium *China Railways* (Supriatna, 2017).

Kajian literatur selanjutnya adalah mengenai kerjasama yang dilakukan oleh Tiongkok dengan beberapa negara lain dalam sektor infrastruktur. Tak hanya melakukan kerjasama bilateral dengan Indonesia saja, namun Tiongkok juga menjalin kerjasama pembangunan infrastruktur transportasi dengan beberapa negara lainnya seperti pembangunan rel kereta api di Kenya. Kenya merupakan negara yang memiliki banyak peluang untuk meningkatkan ekonominya, akan tetapi hal ini sulit terlaksana karena minimnya infrastruktur yang ada di Kenya. Oleh sebab itu, pembangunan yang ada di Kenya menjadi peluang bagi Tiongkok untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Dalam hal ini Tiongkok memberikan bantuan *loan* atau peminjaman dana untuk pembangunan di Kenya. Kepentingan ekonomi Tiongkok sendiri merupakan kemauan Tiongkok untuk memperluas cakupan pasar industri dan menaikkan tingkat ekspor di Kenya. Tercapainya kepentingan Tiongkok dalam hal ini ditandai dengan adanya peningkatan ekspor Tiongkok sebesar 29% yang sebagian besar diberikan terhadap pengiriman bahan

Rania Viccie Adnyahayu, 2022

IMPLEMENTASI KERJA SAMA INDONESIA – TIONGKOK DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI LAUT DI PELABUHAN KUALA TANJUNG

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

bangunan Tiongkok untuk membangun rel kereta api Kenya (Agustina, 2016). Selanjutnya adalah kerjasama Tiongkok dengan Kazakhstan dimana kedua negara memiliki hubungan ekonomi yang mencapai tingkat baru dalam kemitraan strategis yaitu proyek *belt and road initiative*. Pada dasarnya jika dilihat dari data yang ada pada tahun 2018 volume ekspor dan impor tahunan di Kazakhstan telah mencapai \$74,4 miliar dimana hal ini dinyatakan naik sebesar 23,4% karena inisiatif kerjasama *one belt one road*. Dalam proyek ini Kazakhstan yang terletak di Eurasia yang tak memiliki jalur laur, inisiatif lintas benua Tiongkok telah menghadirkan prospek dan peluang baru dengan mengembangkan potensi transitnya. Rute transit wilayah Kazakhstan dibuka untuk saluran bagi Tiongkok agar memasuki pasar Eropa, Timur Tengah, dan CIS demi membentuk koridor ekonomi antara Tiongkok dan Eropa melalui Kazakhstan. Adapun dilakukannya kerjasama ini karena kepentingan Kazakhstan yang membutuhkan mitra dagang baru untuk memanfaatkan potensi sumber dayanya yaitu minyak. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kazakhstan dengan Tiongkok sedang mengembangkan transportasi dan infrastruktur untuk meningkatkan kemampuan transit dan logistiknya melalui proyek regional jalur sutra (Svetlana, 2020). Selanjutnya, Tiongkok juga menjalin kerjasama bilateral dengan Turki dalam proyek *belt and road initiative* dimana hal ini juga menjadikan hubungan antara keduanya menjadi *strategic partnership*. Dapat dilihat dari kepentingan utama Turki menjalin kerjasama *belt and road initiative* adalah untuk mengembangkan hubungan yang lebih intens dengan Tiongkok, dalam hal tersebut Turki menjembatani ekonomi budaya Timur dan Barat serta menyediakan koneksi ke Eropa, Asia, dan Afrika. Proyek BRI juga telah meningkatkan kepentingan Turki dalam mendapatkan keamanan untuk modal dan komoditas di wilayahnya. Tak hanya itu, Turki juga mencapai keuntungan yang signifikan dalam perdagangan luar negeri, energi, serta investasi melalui program BRI. Perjanjian antara Turki dan Tiongkok dapat membantu mengurangi perdagangan Turki yang defisit terhadap Tiongkok dengan fasilitas aliran barang Turki ke Tiongkok (Kulaksiz, 2019).

Penulis memilih beberapa literatur-literatur diatas karena memiliki keterkaitan serta kesamaan yang muncul untuk dapat membantu penulis

Rania Viccie Adnyahayu, 2022

IMPLEMENTASI KERJA SAMA INDONESIA – TIONGKOK DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI LAUT DI PELABUHAN KUALA TANJUNG

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

memperdalam pengetahuan dalam penjabaran tulisan. Dengan memperdalam tema tentang kerjasama Tiongkok-Indonesia dalam pembangunan infrastruktur, serta kerjasama Tiongkok dengan beberapa negara lain terkait pembangunan infrastruktur, maka penulis mendapat gambaran dari sisi kerjasama negara lain mengenai tujuan, proses, hingga peluang dan tantangan yang ada di dalam suatu kerjasama bilateral. Untuk memperdalam mengenai proses kerjasama bilateral penulis juga mengumpulkan literatur yang memiliki korelasi. Penulis melihat bahwa kajian literatur yang membahas mengenai implementasi kerjasama Indonesia dengan Tiongkok tidak memiliki spesifikasi dalam letak infrastruktur transportasi yang dibahas. Literatur serupa yang ditemukan penulis mengenai studi kasus Pelabuhan Kuala Tanjung juga memiliki perbedaan pada negara mitra yakni Belanda, literatur ini membahas perspektif kerjasama Indonesia dengan Belanda dalam pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung. Hal tersebut memunculkan berbagai perspektif baru bagi penulis dalam memandang bagaimana implementasi kerjasama bilateral Tiongkok-Indonesia dalam pembangunan infrastruktur lain serta kerjasama bilateral yang dijalin Tiongkok dengan negara lain.

Beberapa penelitian terdahulu yang sudah dikumpulkan dirasa memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang lebih berfokus dalam implementasi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam pembangunan infrastruktur transportasi laut dengan studi kasus Pelabuhan Kuala Tanjung. Oleh karena itu, penulis akan menggunakan teori kerja sama bilateral serta *Foreign Direct Investment* dimana keduanya akan dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang nantinya akan dianalisis dan menjelaskan lebih dalam bagaimana implementasi kerja sama Indonesia dengan Tiongkok dalam pembangunan infrastruktur laut di Indonesia dengan studi kasus Pelabuhan Kuala Tanjung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan, Indonesia dan Tiongkok memiliki hubungan yang erat di dalam sektor transportasi laut dari berbagai aspek operasional pelabuhan, jasa perkapalan, serta pengembangan dan pembangunan pelabuhan. Seperti salah satunya adalah perestujuan kerja sama

Rania Viccie Adnyahayu, 2022

IMPLEMENTASI KERJA SAMA INDONESIA – TIONGKOK DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI LAUT DI PELABUHAN KUALA TANJUNG

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

pengembangan infrastruktur dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) antara pihak pemerintah Indonesia yaitu PT. Pelabuhan Indonesia I Persero dengan badan usaha milik Tiongkok yaitu *Zhejiang Provincial Seaport Investment & Operation Group Co. Ltd.* yang sudah dimulai dari tahun 2019 dan disahkan pada tanggal 7 Mei 2021. Tetapi, pada pelaksanaan kerja sama pengembangan dan pembangunan Pelabuhan Kuala Tanjung ini timbul berbagai kendala. Kerja sama ini telah disepakati sejak tahun 2019, namun hingga saat ini pembangunan tahap keseluruhan masih belum tuntas. Sehingga, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis bagaimana implementasi dari kerja sama pemerintah Indonesia dan Tiongkok serta seluruh pihak terkait dalam menyelesaikan permasalahan ini. Adapun rumusan masalah bagi penelitian ini yaitu:

“Bagaimana Implementasi Kerja Sama Indonesia – Tiongkok Dalam Pembangunan Infrastruktur Pelabuhan Kuala Tanjung?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana proses implementasi kerja sama Indonesia dan Tiongkok untuk pembangunan dan pengembangan proyek Pelabuhan Kuala Tanjung demi meningkatkan kualitas infrastruktur nasional.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Manfaat Akademis**, penelitian ini menjadi salah satu pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan lebih dahulu oleh peneliti lainnya dengan beberapa perbedaan dari penelitian sebelumnya. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan bahan literature mengenai Kerjasama internasional, serta memberikan kontribusi dan wawasan dalam ilmu hubungan internasional khususnya sektor transportasi laut.
2. **Manfaat Praktis**, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk masyarakat Indonesia dalam memberikan informasi perihal kerjasama

Rania Viccie Adnyahayu, 2022

IMPLEMENTASI KERJA SAMA INDONESIA – TIONGKOK DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI LAUT DI PELABUHAN KUALA TANJUNG

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

internasional dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur sektor transportasi laut.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman alur pemikiran penelitian ini, maka tulisan ini dibagi dalam beberapa bagian yang terdiri dari bab dan sub-bab. Sistematika penulisan tersebut membagi hasil penelitian ke dalam enam bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Di dalam bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan yang dibahas.

BAB II KERANGKA PEMIKIRAN

Di dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai kerangka pemikiran berupa teori dan konsep penulis mengenai permasalahan yang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Di dalam bab ini penulis menjelaskan tentang metode penelitian apa yang digunakan untuk menganalisa permasalahan yang diteliti, serta proses penulis mesertakan asal sumber data, teknik pengumpulan hingga waktu lokasi yang digunakan untuk melakukan penelitian.

BAB IV UPAYA PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI MELALUI KERJASAMA BILATERAL

Di dalam bab ini penulis menjelaskan kondisi infrastruktur nasional serta upaya implementasi pada infrastruktur transportasi melalui adanya kerja sama bilateral.

BAB V KERJASAMA INDONESIA – TIONGKOK DALAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PELABUHAN NASIONAL

Di dalam bab ini dijelaskan proses implementasi kerja sama Indonesia – Tiongkok dalam pembangunan infrastruktur laut dari awal terlaksananya kerja sama pembangunan pelabuhan hingga akhir periode MoU tahun 2021.

BAB VI PENUTUP

Rania Viccie Adnyahayu, 2022

IMPLEMENTASI KERJA SAMA INDONESIA – TIONGKOK DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TRANSPORTASI LAUT DI PELABUHAN KUALA TANJUNG

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Di dalam bab ini penulis memaparkan penutup berupa kesimpulan serta saran dari penelitian yang telah dilakukan.